



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2023



14
februari
2024

**PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA**
14/2
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1747/SJ/XII/2015 pada tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Secara substantif Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. serta penjelasan mengenai kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 31 Desember 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

NIP. 197608312007011002



PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI INTERNAL KPU KAB. PURWAKARTA T.A 2023

Kami telah melakukan evaluasi internal atas Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023. Substansi informasi yang dimuat dalam LAKIP ini menjadi tanggungjawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi internal bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan evaluasi internal kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

Purwakarta, 31 Desember 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ketua,



DIAN HADIANA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyampaikan laporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta dalam mendukung visi dan misinya, dengan mengacu pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja KPU.

Adapun tujuan yang ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Melaksanakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat waktu, Efisien dan Efektif;
5. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
6. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan;
6. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 03 /PW.02-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta. Adapun indikator Kinerja Utama tersebut antara lain :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan
	2. Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu
	2. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja
	3. Persentase keterbukaan informasi publik
	4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK
3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan

masyarakat	2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan
	3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan
	4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pemilihan
	2. Persentase pemutakhiran data pemilih
	3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih
	4. Persentase pelaksanaan kegiatan pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku
5. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, dengan mengacu pada indikator kinerja pendukung KPU, KPU Kabupaten Purwakarta telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
SURAT PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN EVALUASI INTERNAL	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	13
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	14
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Maksud dan Tujuan	16
C. Tugas dan Fungsi	16
D. Struktur Organisasi	18
E. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kinerja	31
C. Penetapan Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi	51
B. Realisasi Anggaran	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	89

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- Gambar1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Purwakarta
- Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Tahun 2023
- Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
- Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
- Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.2 Capaian Output Kegiatan Tahun 2023 Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Output Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.5 Progress Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terhadap Target RENSTRA Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.6 Progress Capaian Output Kegiatan Tahun 2023 terhadap Target RENSTRA Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan
- Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terhadap Standar Nasional Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Yang Telah Dicapai
- Tabel 3.8 Analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Yang Telah Dicapai
- Tabel 3.9 Analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam Capaian Output Kegiatan Berdasarkan Realisasi Output Kegiatan Yang Telah Dicapai
- Tabel 3.10 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Indikator Kinerja Yang Telah Direalisasikan
- Tabel 3.11 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Output Kegiatan Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Kegiatan Yang Telah Direalisasikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung oleh lembaga penyelenggara yang kredibel. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (*Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*).

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Purwakarta sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Purwakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sedangkan, sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta berwenang untuk:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

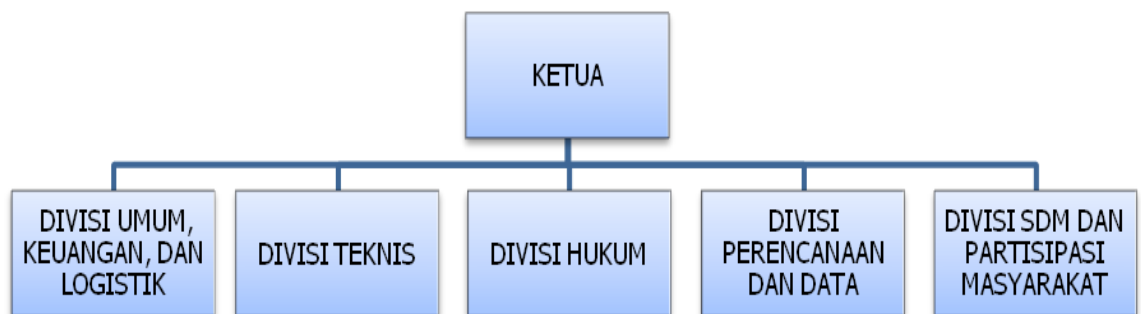
- a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- b. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola Barang Inventaris KPU.

D. STRUKTUR ORGANISASI

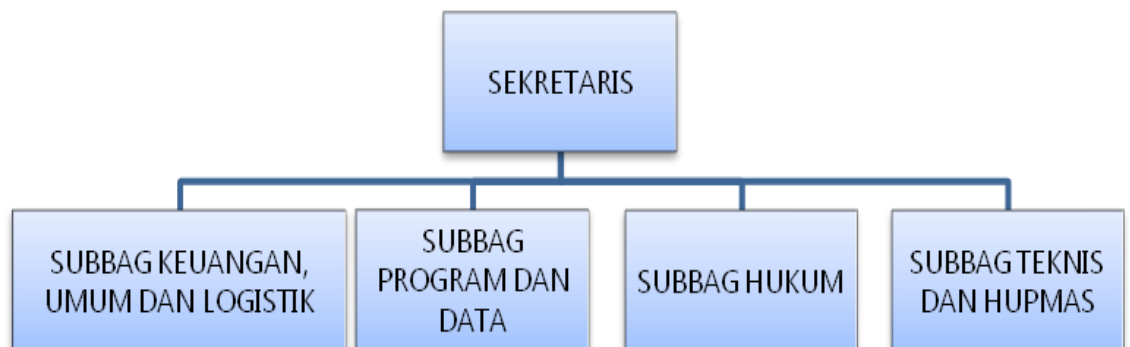
Selanjutnya struktur organisasi KPU Kabupaten Purwakarta dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

**GAMBAR 1.1 :
STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN PURWAKARTA**

1. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA



2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA



E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Purwakarta.

Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada Keputusan KPU Nomor Keputusan KPU No : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Purwakarta memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU Kabupaten Purwakarta. Makna ringkas dari masing- masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
2. Pemilu yang Profesional : memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akuntabilitas, tertib, terbuka, professional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Purwakarta dalam memperjuangkan

kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Dengan mengacu pada visi dan misi KPU, maka untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan misi antara lain :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kabupaten Purwakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Mengacu pada sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta, adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
2. Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
3. Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc
4. Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib

5. Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik
6. Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara
7. Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
8. Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
9. Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
10. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
11. Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
12. Tersedianya Data dan Informasi
13. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya
14. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
15. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
16. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien
17. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
18. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
19. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dengan mengacu pada indikator kinerja utama KPU, KPU Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan Surat Keputusan

KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 03 /PW.02-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta, antara lain:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan
	2. Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu
	2. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja
	3. Persentase keterbukaan informasi publik
	4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK
3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan
	2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan
	3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan
	4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan
	2. Persentase pemutakhiran data pemilih
	3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih
	4. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

5. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu
---	--

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2020-2024 Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Untuk memenuhi Target Indikator Kinerja di atas, Sekretariat KPU Kab. Purwakarta selanjutnya menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang didalamnya memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan yang dilengkapi dengan target output kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Output Kegiatan
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	6867.QGE.001 Pembentukan/ Seleksi Badan Adhoc	1 Lembaga
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara Damai	100%	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan	1 Lembaga

				dan Penghitungan Suara	
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Lembaga
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 Lembaga
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Managemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	3 bulan	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1 Lembaga
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	6872.QGE.001 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga

15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kinerja di atas, KPU Kabupaten Purwakarta membuat penetapan kinerja, sebagai bentuk kontrak kinerja yang telah direncanakan dalam bentuk perjanjian kinerja di bawah ini :

Tabel 2.3 :
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja di atas, Sekretariat KPU Kab. Purwakarta menyusun Rencana Aksi Kinerja yang memuat Jadwal Kegiatan, Perkiraan Biaya, Pelaksana Kegiatan dan Cara mengukur Kinerja pada Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.4 :
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												Pagu Anggaran	Sub Bagian Pelaksana	
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																			
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu																			
6709.QGE.001	a.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kerjanya	1	Lembaga	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, Pelatihan Teknis Kepemilihan, Sosialisasi/ Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan, Penyusunan Peraturan Pemilu, Sarana dan Prasarana IT pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 184.026.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi, dan Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
	b.	Pelaksanaan Dukungan Operasional Lainnya		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 415.759.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
6709.QGE.004	a.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemilihan		1	Lembaga			√	√						√		Rp 4.410.000	Subag Teknis dan Hupmas		
6709.QGE.006	a.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisas/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		1	Lembaga			√	√		√	√			√	√	Rp 145.848.000	Subag Teknis dan Hupmas		
6709.QGE.007	a.	Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Pemilu		1	Lembaga				√	√		√	√		√	√		√	Rp 16.438.000	Subag Hukum dan SDM
6709.RAN	b.	Sarana IT Pemilu		1	Unit							√							Rp 6.058.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi
6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu																			
6710.QGE.001		Pendaftaran dan Verifikasi Partai politik peserta pemilu	Persentase Jumlah dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai politik dan/ atau syarat dukungan calon yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024	1	Lembaga	Kegiatan Verifikasi Partai politik peserta pemilu tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Verifikasi Partai Politik	√	√	√	√	√	√						Rp 7.778.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6710.QGE.003		Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	Rp 1.524.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6710.QGE.004		Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	Rp 1.460.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6710.QGE.005		Pelaksanaan Dukungan Operasional Lainnya		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	Rp 1.515.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6867	Pembentukan Badan Adhoc																			
6867.QGE.001		Pembentukan /Seleksi Badan Adhoc	Persentase Jumlah Dokumen SK Pengangkatan Badan Adhoc, Petunjuk Teknis Penyaluran Anggaran Honor dan Dukungan Operasional Badan Adhoc	1	Lembaga	Kegiatan Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc serta Penyaluran Anggaran Honor dan operasional Badan Adhoc	√	√	√									Rp 1.188.273.000	Subag Hukum dan SDM	
6867.QGE.002		Honorarium Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 14.725.700.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
6867.QGE.003		Dukungan Operasional Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 1.460.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6870	Masa Kampanye Pemilu																			
6870.QGE.001		Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase Jumlah Pedoman atau petunjuk teknis Kampanye Pemilu yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu tahun 2024	1	Lembaga	Kegiatan Masa Kampanye Calon Peserta pemilu tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Monitoring Kampanye									√	√	√	Rp 20.503.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6870.QGE.002		Pengelolaan Kampanye Pemilu		1	Lembaga											√	√	√	Rp 35.731.000	Subag Teknis dan Hupmas

6870.QGE.003		Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu		1	Lembaga												√	√	√	Rp	990.000	Subag Teknis dan Hupmas		
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Lporan, dan Dokumentasi Logistik																							
6871.QGE.001		Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Alokasi Logistik Pemilu	1	Lembaga	Kegiatan persiapan penyusunan Logistik Pemilu dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia serta Dukungan Penyelenggaraan Tugas dalam Fungsi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	61.342.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik		
6871.QGE.002		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	170.400.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara																							
6872.QGE.001		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga													√	√	Rp	33.059.000	Subag Teknis dan Hupmas		
6872.QGE.002		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga														√	√	Rp	4.086.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6872.QGE.003		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga														√	√	Rp	990.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6887	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih																							
6887.QGE.001		Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	10.450.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi	
6887.QGE.002		Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	12.300.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi
6887.QGE.003		Penetapan Data Pemilih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	17.600.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan																							
6889.QGE.001		Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga								√	√	√	√	√				Rp	9.550.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6889.QGE.002		Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga									√	√	√	√	√				Rp	64.600.000	Subag Teknis dan Hupmas
6889.QGE.003		Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga									√	√	√	√	√				Rp	75.307.000	Subag Teknis dan Hupmas
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota																							
6890.QGE.001		Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga								√	√	√	√	√				Rp	9.550.000	Subag Teknis dan Hupmas	
6890.QGE.002		Fasilitasi Pelaksanaan Proses Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga									√	√	√	√	√				Rp	64.600.000	Subag Teknis dan Hupmas
6890.QGE.003		Evaluasi Pencalonan	Persentase Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga									√	√	√	√	√				Rp	75.307.000	Subag Teknis dan Hupmas
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen																							
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara																							
3355.ERA.994	a.	Layanan Perkantoran	Jumlah ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	1	Layanan	Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.295.187.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik		
3355.EBD.955	b.	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah laporan/ dokumen Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten dan persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Dokumen	Kegiatan rutin mengenai pembuatan laporan keuangan dan BMN tingkat satker dan wilayah se Jawa barat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	39.750.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik		
3360		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana																						

3360.EBA.994	a.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan sarana Transportasi, fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung dan gudang untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	1	Layanan	Pemenuhan sarana Transportasi, fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung dan gudang untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	39.525.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
6634		Data Dan Informasi																		
6634_EBA.963		Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	1	Layanan	Kegiatan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/ Kota terkait Daftar Pemilih							√				√	Rp	7.780.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2023 ini sendiri memuat sebanyak 19 sasaran strategis, 22 Indikator Kinerja dan 2 program yang seluruhnya di terjemahkan melalui 22 jenis output kegiatan yang selanjutnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) menjadi pedoman pelaksanaan kinerja pada Tahun 2023. Setiap indikator kinerja dan kegiatan memiliki target yang hendak dicapai pada tahun 2023. Cara pengukuran pencapaian target adalah dengan membandingkan Target tersebut dengan realisasi kinerja, baik dalam bentuk persentase maupun satuan ukur lain yang dipastikan mencerminkan capaian kinerja yang dimaksud. Semakin tinggi persentase capaian kinerjanya, berarti kinerja semakin baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Semester II Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023, merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, diharapkan penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.

Mengacu pada sasaran strategis KPU pada tahun anggaran 2023 Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta pun menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Agar pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan terstruktur dengan baik, pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Semester II Tahun 2023, yang terdiri dari :
 - a. Membandingkan antara target indikator kinerja Semester II tahun 2023 dengan realisasi kinerja Semester II tahun 2023.
 - b. Membandingkan antara target output kegiatan Semester II tahun 2023 dengan realisasi output kegiatan Semester II tahun 2023
2. Perbandingan Target dan Realisasi pada Tahun sebelumnya (Tahun 2022 dan Tahun 2023)
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja Semester II tahun 2022 dengan target dan realisasi kinerja Semester II tahun 2023

- b. Membandingkan antara target dan realisasi output kegiatan Semester II tahun 2022 dengan target dan realisasi output kegiatan Semester II tahun 2023
3. Perbandingan Target dan Realisasi Semester II Tahun 2023 dengan Target RENSTRA Tahun 2023
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja Semester II tahun 2023 dengan target RENSTRA tahun 2023
 - b. Membandingkan antara target dan realisasi output kegiatan Semester II tahun 2023 dengan target output RENSTRA tahun 2023
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja Semester II tahun 2023 dengan Standar Nasional
5. Analisa Penyebab keberhasilan dan kendala yang dihadapi
 - a. Menganalisa penyebab keberhasilan dan kendala pencapaian indikator kinerja Semester II tahun 2023
 - b. Menganalisa penyebab keberhasilan dan kendala pencapaian output kegiatan Semester II tahun 2023
6. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya
 - a. Menganalisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Semester II tahun 2023
 - b. Menganalisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian output kegiatan Semester II tahun 2023
7. Analisa Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
 - a. Menganalisa Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Semester II tahun 2023

Dengan sistematika pengukuran sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kinerja sehingga mendapatkan tingkat kepercayaan laporan kinerja yang lebih baik.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas berkenaan dengan proses pencapaian kinerja tersebut, bab ini juga akan dikemukakan beberapa kondisi yang menjadi kendala pencapaian kinerja yang dimaksud, baik dari

segi regulasi, maupun dari segi teknis implementasi yang berpengaruh kepada tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2023.

Tingkat keberhasilan yang dimaksud di atas diukur dari :

1. Terlaksana atau tidaknya kegiatan;
2. Terobosan yang menunjang keberhasilan kegiatan, berdasarkan kendala yang dihadapi;
3. Prestasi yang diraih;
4. Efisiensi sumberdaya anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

KPU Kabupaten Purwakarta selama tahun 2023 secara umum dapat mencapai target-target sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023 Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dari KPU Kabupaten Purwakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2023
Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	75 %	75%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	1.288	100%

4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	100%	0%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	75%	75%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	75%	75%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	90%	90%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	3 skema	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	75%	75%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	75%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	3 bulan	75%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	75%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	75%	75%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	75%	75%
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	75%	75%

	dan efisien	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	75%	75%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	9 kali	75%
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	75%	75%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	75%	75%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	75%	75%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	75%	75%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	75%	75%

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami sampaikan Persentase Capaian Kinerja Output Kegiatan Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 :
Capaian Output Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan	Capaian Output Kegiatan
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	95%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	15427	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	100%	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	30%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	90%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	90%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Lembaga	1 Lembaga	90%

8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 Lembaga	1 Lembaga	80%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	80%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	3 bulan	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	80%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	80%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	80%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	6872.QGE.001 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	1 Lembaga	80%
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	90%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	85%

16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	80%
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	80%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	80%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	80%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	80%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	80%

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.3 :

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	94,30%	94,30%	100%	98,5 %	98,5 %
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	72,06%	100%	100%	95,29%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	1.288	100%	1.288	1.288	100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	0%	0%	0%	100%	73,21%	73,21%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan Pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	75%	75%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan	0%	0%	0%	100%	75%	75%

		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara						
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	90%	77,03%	77,03%	100%	93,03%	93,03%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	0%	0%	0%	3 skema	3 skema	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	75%	75%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	100%	100%	12 bulan	75%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	2 bulan	3 bulan	85%	3 bulan	75%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	0%	0%	0%	100%	75%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	75%	75%

14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	33,3%	33,3%	100%	75%	75%
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	99,53%	99,53%	100%	75%	75%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	80%	85%	85%	100%	99,96%	99,96%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 kali	10 kali	85%	12 kali	9 kali	75%
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	85%	90%	100%	98%	98%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	85%	90%	100%	95%	95%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	85%	90%	100%	95%	95%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Informasi yang Tepat Waktu dan Valid						
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	60%	100%	95%	100%	95%	95%

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh target indikator kinerja yang dapat tercapai pada tahun 2022 juga dapat dicapai dengan baik di tahun 2023.

Selanjutnya, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami sampaikan Perbandingan Capaian Output Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan, pada table berikut ini :

Tabel 3.4 :
Perbandingan Capaian Output Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
					Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan	Capaian Output Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan	Capaian Output Kegiatan
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	6709.Q GE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	94,30%	1 Lembaga	1 Lembaga	98,5 %

2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	6710.Q GE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1,288	6867.Q GE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	100%	6870.Q GE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	-	-	0%	1 Lembaga	1 Lembaga	73,21%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	6871.Q GE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	75 %
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	6872.QG E.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	-	0%	1 Lembaga	1 Lembaga	75 %
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	6887.Q GE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	-	-	0%	1 Lembaga	1 Lembaga	90 %
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	6889.Q GE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan	-	-	0%	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

				Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan						
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	6890.Q GE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	75 %
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	3355.E BD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	75 %
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	3 bulan	3360.E BA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	75 %
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	6634.E BA.963 Layanan Data dan Informasi	-	-	0%	1 Layanan	1 Layanan	75 %
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	6709.Q GE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	75 %
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	6872.Q GE.001 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	1 Lembaga	33,3%	1 Lembaga	1 Lembaga	75 %
15	Terwujudnya sistem administrasi	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan	100%	3355.E BA.994 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	99,96 %

	penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	kepegawaian secara tepat waktu dan akurat		Perkantoran						
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	3355.E BA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	75%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	6709.Q GE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	85%	1 Lembaga	1 Lembaga	98,05%
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3360.E BA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	99,47%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6634.E BA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	95,91%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6634.E BA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	85%	1 Layanan	1 Layanan	95,91%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	3355.E BD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	68,99%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	6634.E BA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	95,91%

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi output kinerja tahun 2022, dengan tahun 2023 stabil, artinya output yang dapat dicapai di tahun 2022, juga dapat dicapai pada tahun 2023.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Target RENSTRA Tahun 2023

Tabel 3.5 :
Progress Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terhadap Target RENSTRA
Berdasarkan Target Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Indikator Kinerja Utama per Tahun					Progress Terhadap Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	-	-	-	1.288		100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara Damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	-	100%	0%

7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	-	-	-	3 skema	-	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	50%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	53 perkara	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara	0 perkara
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	76,9%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83,3%

16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	9 kali
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	88%	88%	88%	88%	88%	88%	85%

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target jangka menengah pada tahun 2023. Namun demikian, terdapat juga Capaian Indikator Kinerja yang masih dalam progress pencapaian target RENSTRA Tahun 2023.

Selanjutnya, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami sampaikan Progress Capaian Output Kegiatan Tahun 2023 terhadap Target

RENSTRA Berdasarkan Target Output Kegiatan yang telah ditetapkan, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 :
Progress Capaian Output Kegiatan Tahun 2023 terhadap Target RENSTRA
Berdasarkan Target Output Kegiatan Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Renstra	Target Indikator Kinerja Utama per Tahun					Progress Thd Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.288	-	-	-	1.288		100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuak secara damai	100%	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	-	100%	0%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	3 skema	-	-	-	3 skema	-	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	50%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 bulan	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	3 bulan	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka	100%	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

	pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Regulasi KPU									
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	6872.QGE.001 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	53 perkara	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara	0 perkara
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	95%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83,3%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	8 kali	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	9 kali
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase penyampaian Laporan	100%	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%

	penggunaan anggaran	Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid									
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	6634.EBA.9 63 Layanan Data dan Informasi	88%	88%	88%	88%	88%	88%	85%

Tabel di atas menunjukkan progress Capaian Output Kegiatan Tahun 2023 terhadap Target RENSTRA telah terpenuhi dengan baik, artinya setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 3.7 :
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terhadap Standar Nasional Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Yang Telah Dicapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	=, < atau > dari Standar Nasional
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	98 %	<
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	=

3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	1.288	1.288	=
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuak secara Damai	100%	0%	<
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	75%	<
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	75%	<
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	90%	<
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	3 skema	=
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	75%	<
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Managemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	75%	<
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	75%	<
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	75%	<
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	75%	<

	penyuluhannya				
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	53 perkara	75%	<
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	95%	<
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	85%	<
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	9 kali	>
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	75%	<
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	75%	<
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	75%	<
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	85%	<
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	88%	75%	<

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 19 Indikator Kinerja, sebagian besar belum memenuhi standar nasional karena realisasi yang diambil berdasarkan data triwulan III.

5) Analisa Penyebab keberhasilan dan kendala yang dihadapi :

Tabel 3.8 :

Analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Yang Telah Dicapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Perencanaan anggaran Pemilu Hasil: Kegiatan penyusunan dokumen anggaran yang terlaksana dengan baik Kendala: -
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Hasil: Kegiatan layanan pendaftaran dan verifikasi yang terlaksana dengan baik Kendala: -
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pembentukan badan adhoc Hasil: Kegiatan seleksi badan adhoc yang terlaksana dengan baik

			Kendala: -
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara Damai	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pelaksanaan kampanye Hasil: Kegiatan kampanye Pemilu yang terlaksana dengan baik Kendala: -
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu Hasil: Kegiatan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu yang terlaksana dengan baik Kendala: -
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Hasil: Kegiatan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang terlaksana dengan baik Kendala: -
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pemutakhiran Data dan penyusunan daftar pemilih Hasil: Kegiatan pemutakhiran data yang terlaksana dengan baik Kendala: -

8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian penetapan daerah pemilihan Hasil: Kegiatan pengusulan jumlah daerah pemilihan terlaksana dengan baik Kendala: -
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian kegiatan Pencalonan Hasil: Kegiatan pencalonan terlaksana dengan baik Kendala: -
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Managemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan dan BMN Hasil: Kegiatan pengusulan jumlah daerah pemilihan terlaksana dengan baik Kendala: -
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	

14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian layanan perkantoran
			Hasil: Kegiatan Layanan Perkantoran terlaksana dengan baik
			Kendala: -
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
			Hasil: Kegiatan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih terlaksana dengan baik
			Kendala: -
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Dokumen Perencanaan Anggaran
			Hasil: Kegiatan Dokumen Perencanaan anggaran terlaksana dengan baik
			Kendala: -
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja
			Hasil: Kegiatan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja terlaksana dengan baik
			Kendala: -
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
			Hasil: Kegiatan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan terlaksana dengan baik
			Kendala: -
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
			Hasil: Kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan terlaksana dengan baik

			Kendala: -
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Lapopran pertanggungjawaban penggunaan anggaran
			Hasil: Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran terlaksanan dengan baik
			Kendala: -
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output Pengelolaan barang milik negara
			Hasil: Kegiatan pengelolaan barang milik negara terlaksana dengan baik
			Kendala: -
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output layanan perkantoran
			Hasil: Kegiatan layanan perkantoran terlaksana dengan baik
			Kendala: -
10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Dokumentasi dan informasi produk hukum
			Hasil: Kegiatan Dokumentasi dan informasi produk hukum terlaksana dengan baik
			Kendala: -
11	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian teknis pendokumentasian teknis pemilu legislatif pemilu presiden dan wakil presiden
			Hasil: Penyusunan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen) terlaksana dengan baik
			Kendala: -
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Layanan Administrasi Kepemiluan
			Hasil: Kegiatan Layanan Administrasi Kepemiluan terlaksana dengan baik
		Persentase informasi dan publikasi tahapan	Kendala: - Mengukur ketercapaian Publikasi informasi pemilu

		Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	Hasil: Kegiatan Publikasi informasi pemilu terlaksana dengan baik
			Kendala: -
13	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
			Hasil: Kegiatan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
			Kendala: -
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Sistematis dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
			Hasil: Kegiatan Sistematis dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
			Kendala: -
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Inventaris Logistik Pemilu
			Hasil: Kegiatan Inventaris Logistik Pemilu terlaksana dengan baik
			Kendala: -

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh Indikator Kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami sampaikan Juga Analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam Capaian Output Kegiatan Berdasarkan Target Output Kegiatan yang telah dicapai, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 :
Analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam
Capaian Output Kegiatan
Berdasarkan Realisasi Output Kegiatan Yang Telah Dicapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Analisa
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	3357.EAJ.003 Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian layanan perkantoran
				Hasil: Kegiatan Layanan Perkantoran terlaksana dengan baik
				Kendala: -
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	3357.EAJ.003 Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
				Hasil: Kegiatan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih terlaksana dengan baik
				Kendala: -
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3357.FAD.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Dokumen Perencanaan Anggaran
				Hasil: Kegiatan Dokumen Perencanaan anggaran terlaksana dengan baik
				Kendala: -
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	3357.EAL.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

				Hasil: Kegiatan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja terlaksana dengan baik
				Kendala: -
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	3361.EAL..005 Laporan Hasil Reviu Lapran Keuangan (Laporan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
				Hasil: Kegiatan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan terlaksana dengan baik
				Kendala: -
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	3355.EAL.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (Laporan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
				Hasil: Kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan terlaksana dengan baik
				Kendala: -
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawab n penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	3355.EAK.007 Laporan Pertanggungja waban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Lapopran pertanggungjawaban penggunaan anggaran
				Hasil: Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran terlaksanan dengan baik
				Kendala: -
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	3360.EAD.010 Pengelolaan Barang Milik Negara (PKT)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output Pengelolaan barang milik negara
				Hasil: Kegiatan pengelolaan barang milik negara

				terlaksana dengan baik
				Kendala: -
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	3360.EAA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian output layanan perkantoran
				Hasil: Kegiatan layanan perkantoran terlaksana dengan baik
				Kendala: -
10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	3363.BMA.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Dokumentasi dan informasi produk hukum
				Hasil: Kegiatan Dokumentasi dan informasi produk hukum terlaksana dengan baik
				Kendala: -
11	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	3364.BAH.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian teknis pendokumentasian teknis pemilu legislatif pemilu presiden dan wakil presiden
				Hasil: Penyusunan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dokumen) terlaksana dengan baik
				Kendala: -
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	3364.BMA.005 Publikasi Informasi (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Layanan Administrasi Kepemiluan
				Hasil: Kegiatan Layanan Administrasi Kepemiluan terlaksana dengan baik

				Kendala: -
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	3363.BAH.011 Layanan Administrasi Kepemiluan(Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Publikasi informasi pemilu
				Hasil: Kegiatan Publikasi informasi pemilu terlaksana dengan baik
				Kendala: -
13	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	3356.EAB.008 Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaianData Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
				Hasil: Kegiatan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
				Kendala: -
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	3356.AFA.010 Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu (NSPK)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaianSistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
				Hasil: Kegiatan Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
				Kendala: -
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	3356.EAL.010 Inventaris Lgistik Pemilu (Layanan)	Cara Mengukur: Mengukur ketercapaian Inventaris Lgistik Pemilu
				Hasil: Kegiatan Inventaris Lgistik Pemilu terlaksana dengan baik
				Kendala: -

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan, berikut ini adalah beberapa faktor pendukung

keberhasilan capaian kinerja dalam rangka memenuhi target kinerja sebagaimana dijelaskan di atas, yakni :

1. Kompetensi Sumber daya manusia KPU Kab. Purwakarta cukup baik, karena dengan jumlah PNS di KPU Kabupaten Purwakarta yang di bawah standar nasional, dapat dengan optimal melaksanakan tugasnya. Kuncinya adalah Pembagian tugas yang mesti dilaksanakan secara efektif dan efisien
2. Lingkungan kerja yang kondusif membuat para pegawai KPU Kab. Purwakarta dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu
3. Budaya Kerja yang dibangun dengan baik, pola komunikasi antara atasan dan bawahan dibangun dengan memperhatikan kearifan local.

Namun demikian, faktor-faktor penyebab keberhasilan tersebut bukan tanpa kendala. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni :

1. Regulasi yang kurang jelas, seperti :
 - a. Belum adanya kurikulum Pendidikan Pemilih Pemilu
 - b. Belum adanya SOP terkait penghapusan BMN yang telah rusak berat
 - c. Kegiatan Monitoring Pengendalian Intern KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap Anggaran Pemilu 2024 TA 2023 belum ditunjang dengan SOP
2. Penyusunan Anggaran yang menggunakan bersifat Top Down, menyebabkan anggaran tidak proporsional, bahkan beberapa kegiatan tidak terfasilitasi biayanya, yakni :
 - a. Belum adanya Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu yang Proporsional sehingga jumlah Revisi Anggaran Tahun 2023 sampai triwulan IV dilakukan 12 kali revisi
 - b. KPU RI belum memiliki database yang lengkap berkenaan jumlah pegawai yang ada dalam setiap satker, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya beberapa revisi di tingkat pusat berkenaan dengan belanja pegawai
 - c. Jumlah personil dan besaran Honorarium Tenaga Teknis Pendukung tidak sesuai beban kerja. Selain itu, komposisi anggaran yang disusun tidak mengakomodir semua kebutuhan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019
3. Teknis Pelaksanaan Kegiatan
 - a. belum adanya bimbingan teknis penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan terutama tatacara Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU Kab/Kota

- b. Belum adanya bimbingan teknis pelaksanaan Analisis capaian kinerja dari KPU Provinsi/KPU RI
 4. Kurangnya atensi KPU RI terhadap kegiatan pasca Pemilu/Pemilihan
 - a. Kegiatan Pemusnahan Logistik tidak teranggarkan secara proporsional, sehingga bagi KPU Kabupaten Purwakarta, yang notabene memiliki beban logistik terbesar dari seluruh satker se Indonesia perlu didukung oleh anggaran Hibah APBD
 - b. Infrastruktur penunjang pengelolaan logistic pasca pemilu/Pemilihan dalam hal ini pergudangan dan sarana prasarana penunjangnya tidak memadai
 5. Faktor lainnya
 - a. Lemari arsip KPU Kabupaten Purwakarta tidak dapat lagi menampung arsip yang ada

6) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 3.10 :

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Indikator Kinerja Yang Telah Direalisasikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Rp 39.750.000	Rp 29.171.660	73,39%	26,61 %
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih	Rp 108.862.000	Rp 103.845.480	96,76%	3,24%

		Tepat Waktu				
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Rp 1.774.122.000	Rp 1.660.281.426	93,58%	6,42%
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Rp 39.750.000	Rp 29.171.660	73,39%	26,61 %
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Rp 3.998.000	Rp 2.616.000	65,43%	34,57 %
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Rp 25.379.000	Rp 24.851.500	97,92%	2,08%
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan	Rp 9.632.000	Rp 5.394.500	56,01%	43,99 %

		Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Rp 14.587.000	Rp 13.781.000	94,47%	5,53%
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Rp 1.328.348.000	Rp 1.265.570.786	95,27%	4,73%
10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Rp 22.030.000	Rp 17.331.300	78,67%	21,33 %

11	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/K IP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	Rp 60.410.000	Rp 58.060.600	96,11%	3,89%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pe milihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	Rp 17.500.000	Rp 17.473.600	99,85%	0,15%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Rp 8.460.000	Rp 5.265.000	62,23%	37,77 %

13	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/K IP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pe milihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuha n kebutuhan logistik	Rp 6.676.000	Rp 6.035.000	90,40%	9,60%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/K IP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota yang mendistrib usikan logistik Pemilu/Pe milihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Rp 1.756.000	Rp 1.030.600	58,69%	41,31 %
		Persentase KPU/KIP Kabupaten /Kota yang menginvent arisir dan memelihara logistik Pemilu/Pe milihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaa n	Rp 1.816.000	Rp 1.300.000	71,59%	28,41 %

		pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan			
	JUMLAH		Rp 4.097.784.000	Rp 3.994.313.304	97,47% 2,53%

Tabel di atas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang cukup tinggi, yakni 3,82%. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Target Indikator Kinerja pada tahun 2023 tercapai dengan baik, bahkan banyak diantaranya melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut KPU Kabupaten Purwakarta telah menyerap 97,51% dari dana yang telah dianggarkan. Dana yang telah dianggarkan sebesar Rp **39.988.707.000,-** dan digunakan sebesar Rp **38.993.826.948,-**. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sebesar Rp. 994.880.052,- atau sebesar 2,49%, Selain efisien secara anggaran, KPU Kabupaten Purwakarta pun efisien dalam sumberdaya manusia. Jumlah personil yang ada sangat efisien, terdiri dari :

1. 5 orang Komisioner
2. 1 orang Sekretaris
3. 4 orang Kasubag
4. 6 orang Staf PNS
5. 2 orang OB
6. 3 Orang Satpam dan
7. 1 Orang Supir

Total Personil 22 orang, mengelola 17 Kecamatan, 192 Desa/Kelurahan dan 2.693 TPS di Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami sampaikan Juga Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Output Kegiatan Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Kegiatan Yang Telah Direalisasikan, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11 :
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Output Kegiatan
Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Kegiatan Yang Telah Direalisasikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp 1.806.026.000	Rp 1.804.231.948	99,90 %	0,10 %
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	6887.QGE.001, 002.003 Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih (Layanan)	Rp 108.862.000	Rp 105.330.480	96,76 %	3,24 %
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3355.EBD.955 Dokumen Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	Rp 39.750.000	Rp 29.171.660	73,39 %	26,61 %
4	Terwujudnya Data dan Informasi Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Layanan Dukungan Manajemen Internal	6634.EBA.963 Laporan Layanan Data dan Informasi (Laporan)	Rp 7.780.000	Rp 7.461.500	95,91 %	4,09 %
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Rp 39.525.000	Rp 39.316.774	99,47 %	0,53 %

6	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Presentase laporan Perencanaan dan Anggaran yang efektif dan efisien	6709.QGE.001 Laporan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu (Laporan)	Rp 1.324.753.000	Rp 1.267.948.794	95,71 %	4,29 %
7	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	Presentase laporan Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	6709.QGE.006 Laporan Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu (Laporan)	Rp 426.872.000	Rp 375.745.132.948 .794	88,02 %	4,29 %
8	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu	Presentase laporan Penyusunan Peraturan Pemilu	6709.QGE.007 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (Layanan)	Rp 16.438.000	Rp 10.604.200	64,51 %	35,4 9%
9	Terlaksananya Sarana IT Pemilu	Presentase laporan Pengelolaan IT Pemilu	6709.RAN.001 Laporan Pengelolaan IT Pemilu (Laporan)	Rp 6.058.000	Rp 5.983.300	98,77 %	1,23 %
10	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase Laporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	6710.QGE.001 Laporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Layanan)	Rp 11.966.000	Rp 11.964.500	99,99 %	0,01 %
11	Terwujudnya Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc, Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc pada Tahapan Pemilu thn 2023 Sesuai Jadwal	Persentase Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc, Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc pada Tahapan Pemilu thn 2023 sesuai dengan jadwal.	6867.QGE Dokumen Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc, Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc (Layanan)	Rp 32.109.796.000	Rp 26.914.074.332	99,97 %	0,03 %

12	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Masa Kampanye Pemilu	Persentase Pelaksanaan Tahapan Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Masa Kampanye Pemilu (Layanan)	Rp 72.224.000	Rp 44.936.485	62,22 %	37,78 %
13	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	6871.QGE Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu (Layanan)	Rp 3.501.450.000	Rp 2.965.861.012	84,70 %	15,30 %
14	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	6872.QGE Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu (Layanan)	Rp 16.135.000	Rp 8.239.000	51,06 %	48,94 %
15	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	6888.QGE Pelaksanaan Penetapan Peserta Pemilu (Layanan)	Rp 7.760.000	Rp 3.570.000	46,01 %	53,99 %
16	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	6889.QGE Pelaksanaan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Layanan)	Rp 149.625.000	Rp 128.054.837	85,58 %	14,42 %
17	Terlaksananya Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Persentase Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	6890.QGE Pelaksanaan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (Layanan)	Rp 343.686.000	Rp 316.691.264	92,15 %	7,85 %

7) Analisa Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Berikut ini adalah beberapa terobosan yang menunjang dalam rangka memenuhi target kinerja, yakni :

1. Setiap Kasubbag secara rutin mengadakan staf meeting, dalam rangka penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan;
2. Konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah KPU Provinsi, KPPN, KPKNL, dll

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2023:

Tabel 3.12
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Output Kegiatan Berdasarkan Pagu Anggaran Pada Kegiatan Yang Telah Direalisasikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)	Efisiensi (%)	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1.893.081.000	1.880.181.882	99,32%	0,68 %	3355.EB A.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1.806.026.000	1.675.467.948	99,90 %	0,10 %

2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	108.862.000	105.330.480	96,76%	3,24%	6887.QG E.001, 002,003 Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih (Layanan)	108.862.000	105.330.480	96,76%	3,24%
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1.324.753.000	1.267.948.794	95,71%	4,29%	6709.QG E.001 Dokumen Perencanaan Anggaran (Layanan)	1.324.753.000	1.267.948.794	95,71%	4,29%
4	Terwujudnya Sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan sosialisasi yang efektif, akuntabel dan tepat waktu	426.872.000	375.745.132	88,02%	11,98%	6709.QG E.006 Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi (Laporan)	426.872.000	375.745.132	88,02%	11,98%
5	Meningkatnya pengelolaan sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Pengelolaan Sarana IT KPU	6.058.000	5.983.300	98,77%	1,23%	6709.RA N.001 Pengelolaan Sarana IT Pemilu (Laporan)	6.058.000	5.983.300	98,77%	1,23%

6	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024	Jumlah laporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	11.966.000	11.964.500	99,99%	0,01%	6710.QG E.001 Laporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Laporan)	11.966.000	11.964.500	99,99%	0,01%
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pembentukan Badan Adhoc	32.109.796.000	31.868.716.062	99,25%	0,75%	6867.QG E.001 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pembentukan Badan Adhoc (Laporan)	32.109.796.000	31.868.716.062	99,25%	0,75%
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Badan Adhoc	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam Pengelolaan Honorarium Badan Adhoc	24.469.250.000	24.469.200.000	100%	0%	6867.QG E.002 Honorarium Badan Adhoc (Lembaga)	24.469.250.000	24.469.200.000	100%	0%
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Badan Adhoc	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam Pengelolaan Honorarium Badan Adhoc	6.538.435.000	6.297.478.162	96,31%	3,69%	6867.QG E.003 Honorarium Badan Adhoc (Lembaga)	6.538.435.000	6.297.478.162	96,31%	3,69%

10	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	16.438.000	10.640.200	64,51%	35,49 %	6709.QG E.007 Penyusunan Peraturan Pemilu (Layanan)	16.438.000	10.640.200	64,51 %	35,49 %
11	Terwujudnya Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam mempersiapkan Masa Kampanye Pemilu	72.224.000	44.936.485	62,22 %	37,78 %	6870.QG E.001 Laporan Masa Kampanye Pemilu (Layanan)	72.224.000	44.936.485	62,22 %	37,78 %
12	Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.385.477.000	1.297.393.537	93,64%	6,36 %	6871.QG E.001 Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (Layanan)	1.385.477.000	1.297.393.537	93,64 %	6,36 %
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.014.177.000	1.643.070.975	81,58%	18,42 %	6871.QG E.002 Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Layanan)	2.014.177.000	1.643.070.975	81,58 %	18,42 %

13	Terlaksananya fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan / Fasilitasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	16.135.000	8.239.000	51,06%	48,94 %	6872.QG ELaporan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	16.135.000	8.239.000	51,06%	48,94 %
14	Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	7.760.000	3.570.000	46,01%	53,99 %	6888.QG R.003 Laporan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	7.760.000	3.570.000	46,01%	53,99 %
15	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan / Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	149.625.000	128.054.837	85,58%	14,42 %	6889.QG ELaporan Fasilitasi Penyiapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	149.625.000	128.054.837	85,58%	14,42 %
16	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan / Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	343.686.000	316.691.264	92,15%	7,85 %	6890.QG ELaporan Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	343.686.000	316.691.264	92,15%	7,85 %

17	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas dan Fungsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi	39.525.000	39.316.774	99.47%	0,53 %	3360.EB A.994 Laporan Fasilitasi Layanan Perkantoran	39.525.000	39.316.774	99.47 %	0,53 %
18	Terwujudnya Layanan Data dan Informasi	Persentase Tersedianya fasilitasi Layanan Data dan Informasi	7.780.000	7.461.500	95.91%	4,09 %	3360.EB A.994 Laporan Fasilitasi Layanan Perkantoran	7.780.000	7.461.500	95.91 %	4,09 %

Tabel di atas diketahui bahwa jumlah Total Pagu Anggaran KPU Dana yang telah dianggarkan sebesar Rp **39.988.707.000,-** dan digunakan sebesar Rp. **38.993.826.9488,-**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum prosentase penyerapan anggaran untuk kegiatan KPU Kab. Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **97,51 %**.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Purwakarta akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan penyelenggaraan Pemilu.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

B. REKOMENDASI

1. KPU RI sebagai pembuat regulasi sebaiknya melakukan penyempurnaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan secara lebih spesifik, agar KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan lebih terencana dan bersandar pada dasar hukum yang jelas. Regulasi yang dibutuhkan antara lain :
 - a. Penyempurnaan Kebijakan Pembatasan Periodisasi Badan Penyelenggara Adhock;
 - b. Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pendidikan Pemilih Pemilu
 - c. Petunjuk Teknis berkenaan konten sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
 - d. Petunjuk Teknis terkait penghapusan BMN yang telah rusak berat
 - e. Petunjuk Teknis SPIP
2. Penyusunan Anggaran sebaiknya bersifat bottom up, sehingga komposisi anggaran semakin proporsional di setiap Kabupaten/Kota, dan seluruh kegiatan terfasilitasi biayanya dengan baik. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya dalam penyusunan anggaran, KPU RI membuat clusterisasi KPU Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya proporsionalitas anggaran di setiap KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU RI perlu menyiapkan Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terutama berkenaan dengan Tugas-tugas yang akan diberikan, seperti :
 - a. Bimbingan teknis penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan terutama tatacara Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU Kab/Kota;
 - b. Bimbingan teknis pelaksanaan Analisis capaian kinerja dari KPU Provinsi/KPU RI;

- c. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;
- d. Sinkronisasi Jadwal Kegiatan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Danny M.M. Pora, S.STP.**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE. MM.**

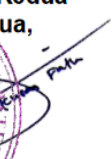
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Februari 2023

Pihak Kedua
Ketua,

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN, SE. M.M.

Pihak Pertama
Sekretaris,

DANNY M. M. POR
NIP. 19810516 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Purwakarta dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
4.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Purwakarta	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta yang di Reviu oleh Inspektorat	B
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Purwakarta	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Purwakarta	77%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%
8.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Purwakarta serta media massa.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5 %
10.	Meningkatnya penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

Program	Anggaran
<u>076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</u>	
1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 772.539.000,-
2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	Rp. 12.277.000,-
3. Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Rp. 19.583.455.000,-
4. Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 57.244.000,-
5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp. 231.742.000,-
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 38.135.000,-
7. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Rp. 40.350.000,-
8. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	Rp. 149.457.000,-
9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Rp. 308.004.000,-
<u>076.01.WA Program Dukungan Manajemen</u>	
10. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 1.382.242.000,-
11. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Rp. 39.525.000,-
12. Data dan Informasi (6634)	Rp. 7.780.000,-
Total	Rp. 22.575.425.000,-

Purwakarta, Februari 2023

Pihak Kedua
Ketua,

AHMAJIKHSAN FATHURRAHMAN, SE. M.M.

Pihak Pertama
Sekretaris,

DANNY M. M. PORA
NIP. 19810516 200012 1 001

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIS TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggara ad hoc yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta	B
		Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

Purwakarta, Februari 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Sekretaris,



Danny M.M. Pora S.STP.

NIP. 198105162000121001

3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

RENCANA AKSI KINERJA/ KEGIATAN 2023

Nama Satker : KPU Kabupaten Purwakarta
Tahun : 2023
Anggaran

No.	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												Pagu Anggaran	Sub Bagian Pelaksana		
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
01	076.01.LQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																			
1.	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu																			
	6709.QGE.001	a. Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerjanya	1	Lembaga	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, Pelatihan Teknis Kepemilihan, Sosialisasi/ Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan, Penyusunan Peraturan Pemilu, Sarana dan Prasarana IT pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	184.028.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi, dan Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
		b. Pelaksanaan Dukungan Operasional Lainnya		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	415.759.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
	6709.QGE.004	a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemilihan		1	Lembaga			√	√								√		Rp	4.410.000	Subag Teknis dan Humas
	6709.QGE.006	a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		1	Lembaga			√	√		√	√		√	√		√	√	Rp	145.848.000	Subag Teknis dan Humas
	6709.QGE.007	a. Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Pemilu		1	Lembaga				√	√		√	√		√	√		√	Rp	18.438.000	Subag Hukum dan SDM
	6709.RAN.001	b. Sarana IT Pemilu		1	Unit								√						Rp	6.068.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi
2	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu																			
	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai politik peserta pemilu	Persentase jumlah dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai politik dan/ atau syarat dukungan calon yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu tahun 2024	1	Lembaga	Kegiatan Verifikasi Partai politik peserta pemilu tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Verifikasi Partai Politik	√	√	√	√	√	√						Rp	7.778.000	Subag Teknis dan Humas	
	6710.QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga								√	√	√	√	√	√	Rp	1.524.000	Subag Teknis dan Humas
	6710.QGE.004	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga								√	√	√	√	√	√	Rp	1.480.000	Subag Teknis dan Humas
	6710.QGE.005	Pelaksanaan Dukungan Operasional Lainnya		1	Lembaga								√	√	√	√	√	√	Rp	1.515.000	Subag Teknis dan Humas
3	6867	Pembentukan Badan Adhoc																			
	6867.QGE.001	Pembentukan /Seleksi Badan Adhoc	Persentase jumlah Dokumen SK Pengangkatan Badan Adhoc, Petunjuk Teknis Penyaluran Anggaran Honor dan Dukungan Operasional Badan Adhoc	1	Lembaga	Kegiatan Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc serta Penyaluran Anggaran Honor dan operasional Badan Adhoc	√	√	√									Rp	1.188.273.000	Subag Hukum dan SDM	
	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	14.725.700.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
	6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.480.000	Subag Teknis dan Humas

4	6870	Masa Kampanye Pemilu																				
	6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase Jumlah Pedoman atau petunjuk teknis Kampanye Pemilu yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu tahun 2024	1	Lembaga	Kegiatan Masa Kampanye Calon Peserta pemilu tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Monitoring Kampanye										√	√	√	Rp	20.503.000	Subag Teknis dan Humas	
	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu		1	Lembaga										√	√	√	Rp	35.731.000	Subag Teknis dan Humas		
	6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu		1	Lembaga										√	√	√	Rp	990.000	Subag Teknis dan Humas		
5	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Lporan, dan Dokumentasi Logistik																				
	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Alokasi Logistik Pemilu	1	Lembaga	Kegiatan persiapan penyusunan Logistik Pemilu dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia serta Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	61.342.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	170.400.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik	
6	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara																				
	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga												√	√	Rp	33.059.000	Subag Teknis dan Humas	
	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga													√	√	Rp	4.086.000	Subag Teknis dan Humas
	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga													√	√	Rp	990.000	Subag Teknis dan Humas
7	6887	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih																				
	6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	10.450.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi	
	6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga					√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	12.300.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi	
	6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga					√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	17.600.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi	

8	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan																			
	6889.QGE.001	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	9.550.000	Subag Teknis dan Humas
	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	64.600.000	Subag Teknis dan Humas
	6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	75.307.000	Subag Teknis dan Humas
9	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota																			
	6890.QGE.001	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	9.550.000	Subag Teknis dan Humas
	6890.QGE.002	Fasilitas Pelaksanaan Proses Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	64.600.000	Subag Teknis dan Humas
	6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	Persentase Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga									√	√	√	√	√	Rp	75.307.000	Subag Teknis dan Humas
2.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen																			
10	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara																			
	3355.EBA.994	a. Layanan Perkantoran	Jumlah ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	1	Layanan	Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.295.187.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
	3355.EBD.955	b. Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah laporan/ dokumen Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten dan persentase BMM yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Dokumen	Kegiatan rutin mengenai pembuatan laporan keuangan dan BMM tingkat satyer dan wilayah se Jawa barat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	39.750.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
11	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana																			
	3360.EBA.994	a. Layanan Perkantoran	Jumlah layanan sarana Transportasi, fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung dan gudang untuk mendukung kinerja satyer KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik.	1	Layanan	Pemenuhan sarana Transportasi, fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung dan gudang untuk mendukung kinerja satyer KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	39.525.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
12	6634	Data Dan Informasi																			
	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	1	Layanan	Kegiatan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/ Kota terkait Daftar Pemilih								√				√	Rp	7.780.000	Subag Perencanaan Data dan Informasi

Purwakarta, Februari 2023

Pihak Kedua
Ketua

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Pihak Pertama
Sekretaris

DANNY M. M. PORa

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan	Jumlah penyebaran bahan sosialisasi peraturan kepada partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
		2. Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu	Jumlah data dan bahan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan kebutuhan partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
	2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2022
		2. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan reviu dari KPU RI	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Purwakarta
2.	3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	3. Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten
		4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten
		1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
		2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
	4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan	Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih pemula di kalangan pelajar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kepemiluan	Laporan Tahapan Pemilu 2022
		2. Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
3.	5. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun, dan Purnabakti TNI/Polri	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu maupun pemilukada	Laporan Tahapan Pemilu 2019
		1. Persentase penyediaan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Jumlah Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dibandingkan dengan jumlah seluruh sengketa yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi	Laporan Tahapan Pemilu 2019

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rima Nurmalina



5. PAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT TAHUN 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

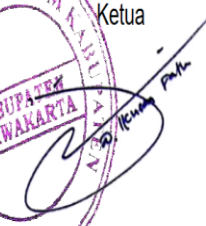
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rahadian Wiguna, Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, *terutama* kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Purwakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Ketua



AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Pembuat Pernyataan



DANNY M. M. PORA
NIP. 19810516 200012 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Gitasari Siswinarti Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi KPU Kabupaten Purwakarta, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, data atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, *terutama* kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Purwakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Sekretaris

Danny M.M. Pora
NIP. 198105162000122001

Pembuat Pernyataan


Gitasari Siswinarti
NIP. 197610182009122001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ade Kurniawan Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik KPU Kabupaten Purwakarta, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, *terutama* kepada *pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai* di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Purwakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Sekretaris

Denny M.M. Pora
NIP. 198105162000122001

Pembuat Pernyataan


Ade Kurniawan
NIP. 198207112009121005



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Atik Musrifa Kepala Sub. Bagian Teknis Dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Purwakarta, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, *terutama* kepada *pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai* di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Purwakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Sekretaris

Danny M.M. Pora
NIP. 198105162000122001

Pembuat Pernyataan



Atik Musrifa
NIP. 198306182009122003



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rima Nurmalina Kepala Sub. Hukum Dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Purwakarta, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, datau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, *terutama* kepada *pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai* di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Purwakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Sekretaris

Danny M.M. Pora
NIP. 198105162000122001

Pembuat Pernyataan


Rima Nurmalina
NIP. 198512122010122004